

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Akuntabilitas sangat dibutuhkan dalam pemerintahan. Akuntabilitas adalah bentuk tanggungjawab pemerintah kepada publik atas pencapaian dari pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah pada satu tahun periode kemudian tanggungjawab tersebut disusun dalam bentuk media pelaporan. (Mardiasmo 2009:21). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau biasa disebut dengan (LAKIP) yaitu media pelaporan yang dimaksudkan. LAKIP mengandung berbagai macam informasi mengenai hal kinerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah selama satu periode dengan tujuan penggambaran dalam menerapkan rencana atau program kerja strategis dan menempatkan masing-masing perangkat daerah dalam organisasi dengan tujuan mencapai peningkatan kualitas kinerja yang diharapkan mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam penerapan prinsip *good corporate governance* pemerintah memberikan gambaran sejauh mana pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang transparan di lingkungan pemerintah. Untuk menghindari kegagalan dalam penyusunan laporan tersebut, pemerintah harus melakukan pengelolaan yang akuntabilitas. Pemerintah tidak akan pernah terlepas oleh pengelolaan anggaran yang akuntabilitas. Penyusunan target anggaran akan mudah dilakukan oleh individu jika sasaran anggaran tersebut jelas. Penyusunan

sasaran anggaran tersebut kemudian akan disesuaikan dengan tujuan organisasi mengenai hasil yang ingin dicapai. (Kenis, 2012 dalam Nuraini dan Indudewi).

Anggaran merupakan suatu instrumen atau pengukuran akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mencapai hasil maksimal, pemerintah membuat program-program kerja yang harus dijalankan. Dari program kerja tersebut akan dibiayai dengan menggunakan dana publik. Dalam anggaran tersebut, program demi program kerja diharapkan dapat terealisasi dengan sempurna. Maka, anggaran adalah hal terpenting dalam berlangsungnya program kerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.

Karakteristik anggaran, salah satu diantaranya ialah kejelasan sasaran anggaran. Yang dimaksud dengan kejelasan sasaran anggaran yang telah disebutkan yaitu suatu rancangan dimana tujuan dari penetapan harus dilakukan dengan jelas dan rinci sehingga mudah dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab dalam mencapai tujuan dari sasaran anggaran tersebut. (Kenis, dalam Suwandi 2013). Jika dalam menyusun sasaran anggaran tidak jelas akan menyusahakan pemerintah dalam mengelola kegiatan yang akan dilakukan. Pada pemerintahan daerah, penyusunan target anggaran akan disesuaikan dengan hasil yang ingin dicapai oleh pemerintah. Selanjutnya dari kejelasan sasaran anggaran pihak pemerintahan dituntut untuk memiliki informasi yang banyak dengan tujuan agar dapat melakukan sebuah prediksi

untuk kehidupan daerah di masa mendatang demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Penyusunan anggaran agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan demi kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka perlu adanya pengendalian atau pengawasan internal pemerintah. Tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2000, dijelaskan masalah mekanisme pengendalian internal di Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengendalian internal berupa rewiu kinerja dan penetapan indikator kinerja. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka pengendalian ini harus diterapkan dalam Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) demi mencapai ke- efektifan dan ke- efisiensi tujuan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas..

Program-program kerja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah harus dipertanggungjawabkan ke publik dalam bentuk laporan kinerja. Laporan tersebut harus disampaikan ke publik secara tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan tersebut terdiri dari dua dokumen didalamnya, yaitu dokumen pertama berisi perjanjian kinerja dan dokumen kedua berisi laporan kinerja. Penyusunan laporan kinerja didasarkan dengan hasil capaian selama satu periodik dinamakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, satu diantaranya ialah kejelasan sasaran anggaran.

Hasil penelitian terdahulu telah dilakukan Fitriana, dkk (2018) dalam penelitian yang dilakukan memperoleh hasil kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, jelasnya sasaran anggaran harus dilaksanakan dengan baik sehingga memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sasaran yang tidak jelas akan menjadikan keraguan pemerintah dalam pelaksanaannya dan menyulitkan pemerintah dalam merealisasikan program kerjanya. Terdapat hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Zakiyudin, Susanto (2015), Hidayatullah, Herdjiono (2015), Primayoni, dkk (2015), Wahyuni, dkk (2013), dan Setiawan (2013) bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP. Namun penelitian yang berbeda ditemukan yaitu penelitian yang telah dilakukan Herawaty (2010) bahwa penelitian yang dilakukannya menghasilkan kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap AKIP.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) ialah Pengendalian Internal. Dari penelitian sebelumnya yang diteliti Afrina (2015), dan Primayoni, dkk (2014) menunjukkan Pengendalian Internal berpengaruh secara positif terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengendalian Internal harus diterapkan dengan baik karena pengendalian yang baik akan memberikan dampak positif terhadap berjalannya proses kegiatan yang dilakukan. Agar kinerja pemerintah mencapai hasil maksimal, maka pengendalian internal

harus terlaksana dengan baik sehingga aktivitas yang dijalankan pemerintah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan secara efektif dan efisien. Namun, perbedaan hasil penelitian ditemukan pada peneliti Wahyuni (2013) bahwa Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pelaporan. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Setiawan (2014) menghasilkan pelaporan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap AKIP. Penelitian mengalami perbedaan dengan hasil oleh peneliti Fitriana, dkk (2018) yang menunjukkan bahwa pelaporan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terdapat persamaan penelitian yang dilakukan Fitriana dengan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin dan Suyanto (2015), Hidayatullah, Herdjiono (2013), Afrina (2015), dan Wahyuni (2013) bahwa sistem pelaporan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap AKIP.

Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya ditemukan, maka dari itu perlu dan layak untuk peneliti dalam melakukan penelitian ini kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dari hasil penelitian Fitriana, dkk. (2018). Perbedaan yang dimaksudkan yaitu mengganti variabel independen pengendalian akuntansi menjadi Pengendalian Internal. AICPA (*American Institute of Certified Public Accountance*) dalam Mulyadi (2002:163) menyebutkan bahwa pengendalian intern terdiri atas pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi, dari

hal ini bahwa pengendalian internal lebih menyeluruh dalam mencakup pengawasan sehingga dalam praktiknya lebih terasa nyata dilaksanakan dengan adanya tim pengendali SAKIP dalam pengendalian menyusun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, sampel penelitian dilakukan di Kantor Dinas Kabupaten Pati.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dalam merealisasikan tugasnya, maka diperlukan sasaran anggaran yang jelas. Demikian pula, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, pemerintah perlu menerapkan Pengendalian Internal agar kinerja dapat terkendali secara efektif dan optimal. Setelah menyelesaikan program kerja yang telah direncanakan, perlu adanya bukti anggaran yang jelas atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Sistem pengelolaan anggaran berupa sistem pelaporan yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan publik. Dari uraian tersebut, maka terdapat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) ?
2. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) ?
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang didasarkan dari perumusan masalah, tujuan penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap kinerja instansi pemerintah.

1.4 Manfaat penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki harapan semoga penelitian ini banyak memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, semoga mampu menambah pengetahuan mengenai kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati, diharapkan mampu menjadikan bahan evaluasi kinerja karyawan dan masukan untuk akuntabilitas kinerja yang lebih optimal..
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

